

PERBANDINGAN SISTEM POLITIK: DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA DAN SISTEM BERAJA DI MALAYSIA

**Adinda Salsabilla Hanifah¹, Nasywa Alya Nabillah², Dhelfia Innova
Putriandy³, Sankania⁴**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan sistem politik, Demokrasi Pancasila di Indonesia dan Sistem Beraja di Malaysia. Penelitian ini menggunakan jenis metode studi pustaka (library research), metode ini melibatkan pengumpulan informasi melalui penelitian teoritis dan referensi dari beberapa sumber literatur yang relevan dengan topik dalam penelitian. Hasil yang didapat adalah Demokrasi Pancasila didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila yang mencakup aspek keagamaan, keadilan sosial, persatuan, dan kebijaksanaan dalam perwakilan. Sistem Beraja berfokus pada monarki konstitusional di mana raja atau sultan memiliki peran simbolis dalam pemerintahan. Demokrasi Pancasila mengadopsi sistem demokrasi representatif di mana pemimpin dipilih melalui pemilihan umum. Sistem Beraja menempatkan raja atau sultan sebagai kepala negara dengan kekuasaan politik yang dipegang oleh perdana menteri yang dipilih oleh parlemen.

Kata Kunci: Demokrasi, Demokrasi Indonesia, Sistem Beraja.

ABSTRACT

This research aims to find out the comparison of political systems, Pancasila Democracy in Indonesia and the Beraja System in Malaysia. This research uses a type of library research method. This method involves collecting information through theoretical research and references from several literature sources that are relevant to the topic in the research. The result obtained is that Pancasila Democracy is based on Pancasila principles which include religious aspects, social justice, unity and wisdom in representation. The Royal System focuses on a constitutional monarchy in which the king or sultan has a symbolic role in government. Pancasila democracy adopts a representative democracy system where leaders are elected through general elections. The Beraja system places the king or sultan as head of state with political power held by a prime minister who is elected by parliament.

Keywords: Democracy, Indonesian Democracy, Beraja System.

PENDAHULUAN

Negara adalah bentuk organisasi dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya seluruh masyarakat yang berada di dalam suatu negara disebut dengan warga negara adalah anggota negara dan harus mengikuti dan tunduk pada peraturan atau hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut. Negara dalam hubungan internasional memiliki peran yang sangat penting sebagai aktor utama yang membuat keputusan dan mengambil tindakan. Keputusan dan tindakan yang diambil oleh sebuah negara akan dianalisis dalam dinamika internasional maupun nasional. Setiap negara memiliki konstitusi masing-masing, dalam hal ini negara dan konstitusi adalah dwitunggal dua indikator yang saling berhubungan dapat juga disebut dengan perangkat negara yang memiliki peran penting dalam suatu negara. Setiap negara pasti memiliki rancangan perubahan yang lebih baik dari rancangan sebelumnya, namun hasil atau keluaran dari rancangan tersebut tidak selalu berhasil atau ada juga yang berdampak buruk bagi negara. Setiap negara memiliki jenis dan sistem politik tersendiri hal ini mencakup otoritas hukum mandiri atau independent atas persebaran populasi di dalam wilayah tertentu yang berdasar pada hak yang diakui. Definisi politik menurut Gabriel A. Almond et.al, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, dimana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya

otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Tindakan dalam politik dapat juga diartikan dengan sebagai salah satu cara mencari solusi secara bersama dalam memecahkan permasalahan yang ada dengan solusi yang masuk akal dan dapat diterima di khalayak masyarakat. Sedangkan sistem dalam politik adalah sebagai proses dari pengumpulan masukan dan prinsip yang akan terciptanya kesatuan cara kerja dalam struktur dan infrastruktur politik yang menjadi kebijakan dalam pemerintah. Dasarnya setiap negara memiliki sistem politik masing-masing dalam menjalankan otoritas hukum pada setiap negara. *Comparative politic* atau perbandingan politik adalah suatu hal yang dipelajari di dalam lingkup politik yang sangat luas. Di Indonesia sendiri menggunakan politik demokrasi Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan, ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Demokrasi adalah kekuasaan atau kekuatan tertinggi dipegang oleh rakyat sehingga negara yang menganut sistem demokrasi memiliki slogan dari rakyat untuk rakyat, dengan kata lain rakyat dapat memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Hal ini terlihat pada susunan penjabatan kabinet pemerintahan dimana dalam satu penguasaan pada setiap jajaran kabinetnya setiap satu menteri memegang satu kursi jabatan atau satu kuasa saja. Demokrasi menjadi hal penting karena menjadi indikator dalam perkembangan politik di suatu negara. Demokrasi Pancasila adalah

Menurut Darmihardjo (Budiyanto, 2005: 54), mengatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya adalah seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945. Lebih lanjut Yudi Latif (2011:383) mengatakan dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Demokrasi Pancasila disimpulkan kedaulatan rakyat yang berasas pada poin-poin Pancasila dalam pengertian ekonomi, politik, sosial serta kedaulatan rakyat diambil secara musyawaratan perwakilan.

Sedangkan di negara tetangga, Malaysia adalah negara federasi yang negaranya terbentuk dari bagian-bagian pemerintahan yang memecah negaranya menjadi beberapa negara. Di Malaysia terdapat tiga institusi pemerintahan yang utama yaitu, badan parlemen, kabinet dan mahkamah. Dalam hal ini Menteri perundangan atau wakil rakyat dapat menjabat juga sebagai ahli di eksekutif dimana dalam suatu pemerintahan terdapat satu menteri yang memegang dua kuasa pada kursi yang berbeda. Pada hal ini terlihat dengan sangat jelas perbedaan demokrasi negara berpresiden dengan negara demokrasi berparlemen. Kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan parlemen di Malaysia dipegang oleh YDPA yaitu singkatan dari Yang di-Pertuan Agong sebutan atau gelar pendek yang diberikan kepada raja yang memimpin di Malaysia yang diganti selama 5 tahun

setelah menjabat. Di bawah YDPA terdapat Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dikarenakan institusi yang berlaku di Malaysia adalah institusi beraja yang berdasarkan perlembagaan maka dengan itu negara yang dikenal dengan sebutan Negara Jiran atau Malaysia menganut sistem demokrasi berparlemen dan berperlembagaan raja di negara ini.

Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya sistem politik di setiap negara adalah hal yang penting dan menjadi pilar kehidupan suatu bangsa atau negara. Dapat dilihat dari dua negara serumpun ini Indonesia dan Malaysia mempunyai sistem demokrasi dan politik yang berbeda. Oleh berdasarkan itu maka penulis tertarik untuk membuat perbandingan berjalannya sistem demokrasi dari dua negara serumpun tersebut dengan rumusan masalah “bagaimana perbandingan perjalanan dari dua negara serumpun dengan sistem demokrasi yang berbeda?”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode studi pustaka (library research), metode ini melibatkan pengumpulan informasi melalui penelitian teoritis dan referensi dari beberapa sumber literatur yang relevan dengan topik dalam penelitian. Penelitian ini memakai data sekunder yang didapat dari berbagai artikel, jurnal, buku, dan publikasi pemerintah terkait

Demokrasi Pancasila di Indonesia dan Sistem Beraja di Malaysia. Melalui berbagai referensi yang didapat tersebut dipelajari secara teliti, lalu disampaikan atau diuraikan secara detail hingga membentuk pembahasan mendalam.

Metode dalam pengumpulan data yang dipakai peneliti dalam studi pustaka ini adalah mencari informasi terkait variabel atau topik penelitian dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan publikasi pemerintah. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan alat berupa daftar ceklis untuk mengelompokkan materi penelitian sesuai dengan fokusnya, merencanakan skema atau peta penulisan, dan menata format catatan penelitian.

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis) dengan tujuan untuk menjamin konsistensi dalam proses evaluasi, mengatasi potensi kesalahan interpretasi, dan mencegah munculnya misinformasi yang dapat timbul akibat keterbatasan pengetahuan peneliti atau ketidakjelasan dalam literatur. Untuk menghindari hal tersebut, maka dilakukan pengecekan silang antara berbagai sumber dan pembacaan ulang literatur. Penulisan laporan penelitian didasarkan pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan, dipilih dengan mempertimbangkan keterbatasan peneliti dalam menganalisis literatur secara mendalam. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk mempermudah

pemahaman pembaca terhadap inti dari topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Demokrasi Pancasila di Indonesia

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, telah mengadopsi sistem demokrasi sejak era reformasi pada tahun 1998. Sistem politiknya didasarkan pada Pancasila, yang menjadi fondasi ideologis negara. Lima prinsip dasar Pancasila, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, membentuk landasan bagi sistem politik Indonesia.

Penerapan demokrasi representatif di Indonesia memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan umum untuk duduk di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Reformasi politik telah membawa kemajuan signifikan dalam hal hak asasi manusia, kebebasan pers, dan partisipasi politik. Namun, tantangan seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan konflik agama masih menjadi hambatan dalam perjalanan demokrasi di Indonesia.

Demokrasi Pancasila juga menekankan pada nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, persatuan, dan menghargai perbedaan. Dalam konteks praktis, hal ini tercermin dalam sistem pemerintahan Indonesia yang mencakup lembaga-lembaga seperti DPR, presiden, dan MA serta peran aktif masyarakat sipil dan keberadaan berbagai partai politik.

untuk terus memperkuat institusi demokrasi, seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, agar dapat bekerja secara efektif dan transparan. Selain itu, pendidikan politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokratisasi juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat pemahaman dan praktik nilai-nilai demokrasi Pancasila. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum pendidikan yang mencakup pendidikan kewarganegaraan dan demokrasi serta melalui promosi budaya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik

Reformasi kelembagaan dan hukum juga menjadi bagian penting dari upaya lanjutan dalam memperkuat demokrasi Pancasila, termasuk dalam meningkatkan independensi lembaga-lembaga pengawas dan menegakkan supremasi hukum.

Sistem politik Indonesia, meskipun telah berhasil mengadopsi prinsip-prinsip

demokrasi, masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satunya adalah tingkat korupsi yang masih cukup tinggi di beberapa tingkatan pemerintahan, yang dapat menghambat pembangunan dan distribusi sumber daya secara adil. Selain itu, terdapat tantangan dalam menjaga stabilitas politik, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap konflik sosial dan politik. Namun demikian, Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilihan umum secara berkala dan relatif damai, menunjukkan kematangan dalam proses demokrasi.

B. Sistem Beraja di Malaysia

Malaysia, dengan sejarah yang kaya dan beragam budaya, memiliki sistem politik yang unik yang dikenal sebagai sistem beraja. Malaysia adalah monarki konstitusional di mana raja atau sultan memiliki peran seremonial dan simbolis dalam pemerintahan. Namun, kekuasaan politik sebagian besar dijalankan oleh perdana menteri dan kabinetnya yang dipilih oleh parlemen.

Sistem politik Malaysia menekankan stabilitas politik dengan memberikan peran yang cukup besar kepada monarki dalam mewakili identitas nasional dan persatuan. Meskipun demikian, ada kritik yang menyatakan bahwa sistem ini dapat membatasi demokrasi dan kebebasan politik, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi dan partisipasi politik.

Malaysia adalah monarki konstitusional yang memiliki sistem pemerintahan di mana raja atau sultan memiliki peran seremonial dan simbolis, sementara kekuasaan eksekutif sebagian besar dipegang oleh perdana menteri dan kabinetnya. Meskipun demikian, raja atau sultan memegang peran penting dalam beberapa aspek, termasuk penunjukan perdana menteri, pengesahan undang-undang, dan pemeliharaan kestabilan politik. Sistem beraja di Malaysia juga mencerminkan warisan budaya dan tradisi Melayu yang kaya.

Sistem beraja di Malaysia mengalami evolusi seiring waktu, dengan adaptasi terhadap perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Meskipun raja atau sultan umumnya tidak terlibat dalam keputusan politik sehari-hari, kehadiran mereka tetap menjadi simbol persatuan dan identitas nasional bagi beragam etnis dan agama di Malaysia. Selain itu, mekanisme konstitusional dan undang-undang mengatur hubungan antara raja atau sultan dengan institusi pemerintah lainnya, menjaga keseimbangan kekuasaan yang diatur dan demokrasi konstitusional yang berfungsi.

Sistem politik Malaysia, dengan keberadaan monarki konstitusional dan sistem parlementer, telah memberikan stabilitas politik yang relatif tinggi. Namun, sistem politik ini juga telah dihadapkan pada

beberapa kontroversi, terutama terkait dengan isu-isu politik etnis dan agama yang kadang-kadang mempengaruhi hubungan antar-etnis dan memicu ketegangan politik. Selain itu, kritik juga ditujukan terhadap kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik Malaysia, dengan beberapa klaim tentang praktik nepotisme dan korupsi yang merajalela.

C. Perbedaan Demokrasi Pancasila dan Sistem Beraja

1. Prinsip Dasar

- **Demokrasi Pancasila:** Didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila yang mencakup aspek keagamaan, keadilan sosial, persatuan, dan kebijaksanaan dalam perwakilan.
- **Sistem Beraja:** Berfokus pada monarki konstitusional di mana raja atau sultan memiliki peran simbolis dalam pemerintahan.

2. Implementasi

- **Demokrasi Pancasila:** Mengadopsi sistem demokrasi representatif di mana pemimpin dipilih melalui pemilihan umum.
- **Sistem Beraja:** Menempatkan raja atau sultan sebagai kepala negara dengan kekuasaan politik yang dipegang oleh perdana

- menteri yang dipilih oleh parlemen.
- Demokrasi Pancasila: Mengalami perkembangan signifikan sejak reformasi 1998 dengan kemajuan dalam hak asasi manusia dan partisipasi politik.
 - Sistem Beraja: Memberikan stabilitas politik kepada Malaysia namun mendapat kritik terkait dengan pembatasan demokrasi.

D. Perbedaan Demokrasi Pancasila dan Sistem Beraja

1. Stabilitas Politik

Kedua sistem politik memberikan stabilitas politik kepada masing-masing negara. Demokrasi Pancasila memberikan stabilitas politik di Indonesia setelah reformasi, sementara Sistem Beraja memberikan stabilitas politik kepada Malaysia.

2. Kepemimpinan

Baik dalam Demokrasi Pancasila maupun Sistem Beraja, pemimpin politik bertanggung jawab kepada rakyat atau parlemen. Meskipun mekanismenya berbeda, keduanya berusaha untuk mewakili kepentingan masyarakat.

- ##### 3. Peran Simbolis Monarki
- Meskipun berbeda dalam implementasi, kedua sistem mengakui peran simbolis monarki dalam mewakili identitas nasional dan persatuan.

E. Perbandingan Demokrasi Pancasila dan Sistem Beraja

Perbandingan antara Demokrasi Pancasila di Indonesia dan Sistem Beraja di Malaysia mengungkapkan perbedaan signifikan dalam prinsip dasar, implementasi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam memberikan stabilitas politik dan mewakili kepentingan rakyat, pendekatan yang berbeda dalam sistem politik mencerminkan keragaman budaya, sejarah, dan nilai-nilai masyarakat di kedua negara.

KESIMPULAN

Demokrasi Pancasila di Indonesia menegaskan bahwa demokrasi di negara ini tidak hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga mencakup nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kesejahteraan, persatuan, dan gotong royong. Implementasi demokrasi Pancasila mencerminkan inklusivitas, partisipasi aktif masyarakat, dan penekanan pada keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan pembatasan

kebebasan berpendapat masih perlu diatasi, tetapi melalui reformasi kelembagaan, penguatan partai politik, dan pendidikan politik, Indonesia dapat terus memperkuat fondasi demokrasi Pancasila menuju masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan demokratis. Malaysia menyoroiti peran simbolis dan seremonial raja atau sultan dalam sistem pemerintahan negara. Meskipun kekuasaan politik sebagian besar dipegang oleh perdana menteri dan kabinetnya, kehadiran raja atau sultan tetap penting dalam menjaga stabilitas politik, mewakili persatuan nasional, dan memelihara warisan budaya dan tradisi Melayu. Evolusi sistem beraja di Malaysia mencerminkan adaptasi terhadap perubahan zaman dan nilai-nilai demokrasi konstitusional. Dengan demikian, sistem beraja di Malaysia menggambarkan harmoni antara tradisi dan modernitas dalam pemerintahan.

Perbandingan sistem politik antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan politik, kepemimpinan, dan struktur pemerintahan. Sistem demokrasi Pancasila di Indonesia menekankan pada pluralisme politik dan partisipasi publik yang lebih langsung, sementara Malaysia dengan sistem berajanya menekankan pada stabilitas politik yang diwakili oleh monarki konstitusional. Meskipun demikian, kedua negara ini memiliki tantangan tersendiri dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan politik yang berkelanjutan.

Perbandingan ini juga menyoroiti perbedaan dalam peran agama dalam politik di kedua negara. Meskipun Indonesia dan Malaysia keduanya memiliki mayoritas Muslim, kedua negara tersebut memiliki pendekatan yang berbeda terhadap hubungan antara agama dan politik. Indonesia lebih menekankan pada prinsip negara yang beragam secara agama dan mengakui pluralisme religius, sementara Malaysia memiliki kebijakan yang lebih cenderung terhadap Islam sebagai agama resmi negara dan mempromosikan konsep ketuanan Melayu.

Selain itu, perbandingan antara Indonesia dan Malaysia juga menyoroiti perbedaan dalam struktur kepemimpinan dan sistem hukum. Indonesia memiliki presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sementara Malaysia memiliki seorang raja sebagai kepala negara yang memiliki peran seremonial. Perbedaan dalam sistem hukum juga mencerminkan pengaruh sejarah dan pengalaman kolonialisme masing-masing negara.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, Indonesia dan Malaysia dapat saling belajar dan berbagi pengalaman untuk memperkuat sistem politik mereka. Pembaharuan politik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pengembangan mekanisme untuk mengatasi ketegangan politik dan sosial adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat

fondasi demokrasi dan kestabilan politik di kedua negara.

Secara keseluruhan, perbandingan antara sistem politik Indonesia dan Malaysia menunjukkan kompleksitas dan dinamika politik di Asia Tenggara. Meskipun memiliki perbedaan dalam pendekatan politik dan sistem pemerintahan, keduanya memiliki komitmen yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Dengan memahami perbedaan dan kesamaan antara kedua negara ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam mempromosikan kemajuan politik dan kesejahteraan sosial di kawasan ini.

SARAN

“Demokrasi Pancasila di Indonesia dan Sistem Beraja di Malaysia” Judul ini menyoroti fokus pada sistem politik dan perbandingan antara kedua negara. Penelitian ini harus melakukan lebih mendalam tentang sejarah politik, perkembangan, dan perbandingan antara Demokrasi Pancasila di Indonesia dan Sistem Beraja di Malaysia. Gunakan sumber daya yang dapat dipercaya dan beragam untuk mendukung klaim dan analisis

Sertakan analisis yang lebih mendalam tentang dampak sistem politik terhadap masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan di kedua negara. Tinjau secara kritis kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem politik dan bagaimana hal tersebut memengaruhi stabilitas dan perkembangan politik di Indonesia dan Malaysia. Gunakan

gaya penulisan yang menarik dan informatif untuk menarik perhatian pembaca. Sertakan contoh konkret, kutipan, atau ilustrasi yang memperjelas poin yang Anda buat dan membuat artikel menjadi lebih menarik.

Selain membandingkan sistem politik secara umum, artikel bisa memperluas cakupan pembahasan dengan memperhatikan aspek-aspek lain seperti perlakuan terhadap minoritas, isu-isu lingkungan, atau hubungan luar negeri. Ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika politik di kedua negara dan bagaimana sistem politik mereka bereaksi terhadap tantangan global.

Wawasan dari ahli politik, akademisi, aktivis, atau pemangku kepentingan lokal akan memberikan kedalaman dan otoritas tambahan pada artikel. Mewawancarai mereka untuk mendapatkan pandangan dan analisis yang lebih mendalam tentang sistem politik Indonesia dan Malaysia akan memberikan sudut pandang yang berharga bagi pembaca.

Selain memaparkan perbandingan antara kedua sistem politik, artikel bisa menyajikan solusi dan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan sistem politik di kedua negara. Ini bisa mencakup saran konkret untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem politik, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, atau meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Menyoroti dampak sistem politik terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat akan membuat artikel

lebih relevan dan menarik bagi pembaca. Ini bisa mencakup pembahasan tentang bagaimana kebijakan politik memengaruhi akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, atau kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gandamana, A. (2017). Memaknai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Handayani PGSD FIP Unimed*, 7(1).
- Tjarsono, I. (2013). Demokrasi pancasila dan bhineka tunggal ika solusi heterogenitas. *Transnasional*, 4(2), 876-888.
- Sudirman, L., & Utami, M. (2015). Analisis Yuridis Terhadap Kebebasan Pers di Indonesia dan Malaysia. *Journal of Judicial Review*, 17(1), 80-100.
- Abd Jalal, A. F., Abd Rahim, R. A., Broughton, M. Y. A. A., & Alias, A. W. (2020). Muzium dan kedaulatan institusi beraja di Malaysia. *Jurnal'Ulwan*, 5(1), 27-44.
- Najib, N. F. A., & Noor, M. N. M. (2022). Dari Perak ke Putrajaya: Pengaruh Institusi Beraja dalam Politik Malaysia Kontemporari. *Jurnal Wacana Sarjana*, 6(5), 1-10.
- Malike Ibrahim.2014. Peranan dan tanggungjawab wakil rakyat dalam sistem politik Malaysia. Universiti Utara Malaysia.
- Ahmad Farid Abd Jalal, Rahimin Affandi Abd Rahim, Mohamed Yusuf Ahmad Adam Broughton, Ahnaf Wafi Alias. 2020. Muzium dan kedaulatan institusi beraja di Malaysia. *Jurnal'Ulwan* 5 (1), 27-44.
- Sigit Somadiyono. 2020. Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia. *Wajah Hukum* 4 (2), 414-420.
- Apiek Gandamana. 2017. Memaknai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Handayani PGSD FIP Unimed* 7 (1).
- Wisesa Artha Raihan. 2016. *Pengertian Negara*. OSF.